

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Gelombang Arab Spring yang melanda kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tahun 2011, telah membawa harapan besar bagi perubahan demokrasi di dunia Arab. Tidak terkecuali bagi Libya yang telah selama 42 tahun terkurung dalam rezim kediktatoran Qadhafi. Gejolak revolusi di negara-negara tetangga seperti Tunisia, Mesir dan Bahrain telah berhasil mendorong kekuatan bagi masyarakat Libya untuk juga melakukan reformasi. Namun di sisi lain, perubahan penting yang dibawa oleh gelombang *Arab Spring* tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan dan Libya pada khususnya. Hal ini membuat Amerika Serikat kemudian merancang strategi untuk arah kebijakannya di Libya.

Berdasarkan analisis skripsi ini dengan menggunakan teori Realisme Demokratik dari Krauthammer, yang memiliki empat poin utama, yaitu peluang, penggunaan kekuatan militer, penyebaran demokrasi, dan kepentingan nasional. Penulis mendapatkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dalam mewujudkan demokrasi di Libya.

Pertama, terkait peluang, penulis melihat bahwa reaksi keras pemerintah Qadhafi terhadap rakyatnya yang menuntut perubahan menuju demokrasi menjadi sebuah jalan masuk bagi Amerika Serikat ke Libya. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Libya membuat Amerika Serikat sebagai polisi dunia, merasa memiliki tanggungjawab dan harus bertindak untuk menghentikan kekejaman Qadhafi. Akhirnya, Amerika Serikat mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi mengenai situasi Libya. Melalui resolusi 1970 dan 1973 yang dikeluarkan DK PBB inilah Amerika Serikat mendapatkan mandat melakukan intervensi untuk menyelamatkan warga sipil Libya. Mandat yang diberikan tersebut menjadi peluang bagi Amerika Serikat untuk tidak hanya sekedar membebaskan rakyat dari kekerasan rezim tetapi mendukung transisi demokrasi Libya.

Kedua, terkait penggunaan kekuatan militer, Amerika Serikat menggandeng negara-negara NATO untuk membantu menjalankan misinya di Libya. Melalui UNSCR 1973, Amerika Serikat mendukung operasi militer NATO melindungi warga sipil Libya. Kebijakan Amerika Serikat di mulai dengan keterlibatan dan peranannya dalam operasi militer *Operation Odyssey Dawn* dan *Operation Unified Protection*. Di awal operasi, Amerika Serikat memanfaatkan kemampuan militernya untuk menghentikan tindakan ofensif rezim Qadhafi dan menurunkan sistem pertahanan udara sebelum seluruh komando diserahkan kepada NATO sepenuhnya.

Pasukan militer Amerika Serikat bersama NATO memainkan peran instrumental untuk melakukan koordinasi pasukan internasional dalam pembentukan zona larangan terbang di atas Libya. Operasi militer tersebut

berhasil melemahkan rezim Qadhafi. Kondisi ini tentunya secara tidak langsung membantu para pemberontak meraih kemenangan mereka. Amerika Serikat juga memberika bantuan pendanaan dan pelatihan kepada militer Libya untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kapasitas kekuatan mereka.

Ketiga, terkait penyebaran demokrasi, penulis menemukan bahwa Amerika Serikat memanfaatkan mandat DK PBB bukan untuk sekedar tujuan kemanusiaan. Tetapi ada tujuan lebih luas, yaitu untuk mendemokratisasikan Libya sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, Amerika Serikat merancang sebuah tatanan baru untuk masa depan Libya yang lebih demokratis.

Amerika Serikat menyusun visi dan mengajukan proposal mengenai pembentukan tata pemerintahan Libya pasca perang yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Amerika Serikat merancang masa depan Libya menjadi sebuah negara demokrasi kapitalis, yang mengikuti model lembaga demokrasi gaya Barat dengan menekankan pada keterbukaan pasar. Berbagai bantuan teknis dilakukan untuk membantu reformasi politik dan reformasi ekonomi. Penulis mendapatkan bahwa dengan mengusung penegakan demokrasi melalui reformasi politik dan ekonomi, merupakan startegi yang dirancang Amerika Serikat untuk bisa mengontrol Libya dalam mencapai keinginannya. Ketika Libya berhasil dalam genggamannya untuk menerapkan nilai-nilai Barat yang diusung Amerika Serikat. Maka akan mudah bagi Amerika Serikat selanjutnya untuk memengaruhi Libya dalam pencapaian kepentingan nasionalnya di Libya.

Keempat, terkait kepentingan nasional, sesuai dengan Realisme Demokratik bahwa Amerika Serikat akan ikut campur di wilayah yang memiliki nilai strategis dan kepentingan nasionalnya terancam. Amerika Serikat melakukan intervensi dengan dalih penyelamatan warga sipil dan demokratisasi, itu karena terdapat kepentingan di Libya. Penulis menemukan bahwa di balik semua kebijakan yang diterapkan Amerika Serikat, terdapat beberapa kepentingan nasional, yaitu dapat menjamin akses minyak dan investasi Amerika Serikat di Libya, dan menjamin keamanan dan kestabilan politik dan ekonomi untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan nasionalnya dalam memperluas wilayah geostrateginya di kawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan Realisme Demokratik dinilai sesuai untuk menjelaskan peristiwa intervensi Amerika Serikat di Libya. Namun, penulis menemukan bahwa Realisme Demokratik dalam kebijakan Amerika Serikat di Libya tidak cukup berhasil. Peluang dan penggunaan kekuatan militer memang telah dimanfaatkan dengan maksimal, yang mana berhasil menggulingkan Qadhafi dari kekuasaannya. Akan tetapi, agenda penegakkan demokrasi yang dirancang melalui pembentukan pemerintahan baru, institusi, pemilu, reformasi ekonomi liberal, dan lain sebagainya tidak berjalan dengan baik. Demokrasi yang awalnya dirancang untuk membantu menciptakan kestabilan politik dan ekonomi, justru menjadikan kondisi Libya semakin buruk.

Perebutan kekuasaan antar oposisi, suku dan militan terjadi. Kestidakstabilan politik ini pun semakin menambah munculnya pemberontakan-pemberontakan dan kelompok-kelompok militan, perang

saudara pun tidak terelakkan. Akibatnya, kondisi peperangan menghancurkan fasilitas kilang-kilang minyak dan menghambat proses ekonomi, perebutan sumber minyak pun terjadi. Sehingga ekonomi Libya mengalami kemorotan juga, kondisi rakyat Libya semakin tidak jelas masa depannya. Kondisi ini tentunya juga berpengaruh terhadap keamanan dan geopolitik kawasan.

Sehingga dapat dilihat bahwa, bukannya mendapatkan keuntungan dan berhasil meraih kemampuannya dengan maksimal, tetapi kebijakan Amerika Serikat di Libya dengan penerapan pendekatan Realisme Demokratik menjadi bumerang sendiri bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat telah gagal mendesain dan melihat konsekuensi masa depan Libya pasca konflik. Yang tercipta bukan Libya yang demokratis, namun yang ada saat ini adalah Libya yang rapuh.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah di paparkan di atas. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan yang menyebabkan kesimpulan dari skripsi ini secara spesifik hanya dapat digunakan dalam diskusi terkait Libya. Sehingga sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait bagaimana proses revolusi negara-negara lainnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sehingga dapat menjadi pembanding dalam melihat bagaimana pergolakan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dalam proses revolusi menuju negara demokratis.